

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 79 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

### IMPLEMENTATION OF THE REGENT REGULATION NUMBER 79 OF 2018 CONCERNING THE MANAGEMENT OF VILLAGE OWNED ENTERPRISES

Dalia Syareatul Aisy<sup>1\*</sup>, Irma Purnamasari<sup>2</sup>, Afmi Apriliani<sup>3</sup>, Gotfridus Goris Seran<sup>4</sup>, Ginung Pratidina<sup>5</sup>, Muhamad Husein Maruapey<sup>6</sup>, Agus Suarman Sudarsa<sup>7</sup>, Imam Edy Mulyono<sup>8</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Djuanda, Bogor-Indonesia

\*Korespondensi: Dalia Syareatul Aisy. Email: [daliassyareatul512@gmail.com](mailto:daliassyareatul512@gmail.com)

(Diterima: 13-09-2024; Ditelaah: 24-09-2024; Disetujui: 01-10-2024)

#### ABSTRACT

The implementation of the Village Owned Enterprises (BUMDes) policy is the process of implementing and implementing the rules and guidelines that have been set by the government to establish and manage businesses at the village level. This research aims to find out how the Implementation of the Bogor Regent Regulation Policy Number 79 of 2018 in the Management of Village Owned Enterprises (BUMDes), to find out what obstacles are faced in the management of Village-Owned Enterprises (BUMDes), to find out what efforts are made to achieve the policy in Cigombong district, Bogor Regency. This study uses a quantitative method with a descriptive approach with data collection techniques using observations that become the main and secondary data, interviews, questionnaires equipped with documentation data and literature studies as secondary data. The analysis technique used Likert scale measurements and used the Weight Mean Score (WMS) formula. The results of the study received an average score of 3.68 which is included in the good category. This is observed according to aspects such as communication, resources, disposition, and bureaucratic structure that have been well realized, but improvements are needed in several aspects of communication and resources to maximize policy implementation. As a result, the efforts made include training for managers, the need to strengthen communication between the village government and the community, increase and improve human resources and improve the bureaucratic structure that supports BUMDes operations.

**Key words:** Policy Implementation, Regent Regulation, Management of Village Owned Enterprises (BUMDes).

#### ABSTRAK

Implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah proses pelaksanaan dan penerapan aturan dan pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mendirikan dan mengelola usaha di tingkat desa. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 79 Tahun 2018 dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi dalam untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes serta mengetahui langkah-langkah yang diambil untuk mencapai kebijakan di Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi sebagai teknik utama, serta wawancara, kuesioner, dokumentasi, dan studi pustaka sebagai data sekunder. Analisis data dilakukan dengan menggunakan skala Likert dan rumus Weighted Mean Score (WMS). Temuan penelitian menunjukkan rata-rata nilai sebesar 3,68, yang berada dalam kategori baik. Meskipun aspek-aspek seperti komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi telah terlaksana dengan baik, masih diperlukan perhatian lebih lanjut. Namun masih diperlukan peningkatan dalam aspek komunikasi dan sumber daya untuk memaksimalkan implementasi kebijakan. Upaya yang diperlukan meliputi pelatihan untuk pengelola, penguatan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat, peningkatan sumber daya manusia, serta perbaikan struktur birokrasi untuk mendukung operasional BUMDes.

**Kata kunci:** Implementasi Kebijakan, Peraturan Bupati, Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Aisy, D.S., Purnamasari, I., Apriliani, A., Seran, G. G., Pratidina, G., Maruapey, M. H., Sudarsa, A. S., & Mulyono, I. E. (2024). Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Governansi*, 10(2): 243-252.

## PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan BUMDes adalah proses penerapan dan pelaksanaan aturan serta pedoman yang telah diterapkan oleh pemerintah untuk mendirikan dan mengelola usaha di tingkat desa, juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ekonomi lokal. Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes merupakan implementasi pengelolaan desa yang dilakukan secara kooperatif, transparan dan berkelanjutan dengan tujuan utama untuk memperbaiki perekonomian desa (Hidayati, 2015).

BUMDes yaitu salah satu faktor penentu pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya di Kecamatan Cigombong. Hal ini memungkinkan mereka untuk meningkatkan pendapatan melalui pelaksanaan kegiatan ekonomi yang dapat memberdayakan mereka secara ekonomi. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat diperlukan pelaksanaan kegiatan ekonomi yang dapat mendorong dan memperbaiki kondisi ekonomi mereka. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan mendirikan BUMDes yang dikelola secara langsung oleh masyarakat desa.

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengatur operasional, pengelolaan dan pengembangan BUMDesdi wilayahnya. Regulasi ini menyediakan struktur yang menyeluruh pembentukan, pengelolaan dan pengawasan BUMDes dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi desa. Peraturan ini hadir sebagai respon atas tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDesseperti kurangnya keterampilan

manajerial, keterbatasan modal dan minimnya partisipasi masyarakat. Regulasi ini diharapkan dapat menjadi pedoman yang jelas dan praktis untuk pemerintah desa dan masyarakat dalam mengelola BUMDes secara efektif dan efisien. Dengan peraturan yang lebih rinci dan sistematis, BUMDes diharapkan dapat berfungsi sebagai penggerak ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Adapun keberadaan BUMDes di Kecamatan Cigombong sebanyak 9 (sembilan) BUMDes dengan rincian sebagai berikut:

DESA	NAMA BUMDES	KETERANGAN
Cigombong	Matra (Mandiri Sejahtera)	Berkembang
Wates Jaya	Jaya Laksana	Fakum
Ciburuy	Bagus	Berkembang
Srogol	Baraya Asik Srogol	Perintis
Cisalada	Rancatan Cisalada	Fakum
Tugu Jaya	Tugu Jaya Mandiri	Berkembang
Pasir Jaya	Salak Mandiri	Fakum
Ciburayut	Sabilulungan	Fakum
Ciadeg	Citra Maju Ciadeg	Fakum

*Sumber: Kecamatan Cigombong, 2024*

Berdasarkan tabel diatas diantara 9 (sembilan) BUMDes yang ada di Kecamatan Cigombong BUMDes yang paling maju yaitu ada di Desa Cigombong, sedangkan beberapa BUMDes lainnya sudah berjalan namun dinyatakan masih kurang aktif, sedangkan BUMDes yang vakum ada 5 (lima) Desa diantaranya yaitu Desa Wates Jaya, Cisalada, Pasir Jaya, Ciburayut dan Ciadeg. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil 4 (empat) desa untuk memahami faktor-faktor yang

mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam pengelolaan BUMDes dalam masing-masing Desa diantaranya yaitu Desa Cigombong (Berkebang), Wates Jaya (Fakum), Ciburuy (Berkebang) dan Srogol (Perintis). Kurangnya sumber daya menjadi masalah utama dalam pengelolaan BUMDes di kecamatan cigombong.

Hal tersebut disebabkan oleh faktor masyarakat yang belum memiliki keterampilan, pengetahuan dan minat yang cukup dalam manajemen bisnis, akuntansi, pemasaran. Hal tersebut disebabkan oleh faktor masyarakat yang belum memiliki keterampilan, pengetahuan dan minat yang cukup dalam manajemen bisnis, akuntansi, pemasaran.

Hal tersebut diperparah oleh kurangnya akses masyarakat desa terhadap sosialisasi, pelatihan dan pengembangan yang relevan yang hanya diselenggarakan 1 (satu) tahun sekali, sedangkan pelatihan dan sosialisasi bagi pengelola BUMDes harusnya dilakukan setidaknya 2 sampai 4 kali dalam setahun sehingga, para pelaku usaha tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan mereka dibidang tersebut. Sumber dana BUMDes yang tidak memiliki kepastian dan terbatas juga sering kali harus bersaing dengan kebutuhan lain yang juga mendesak seperti, pembangunan infrastruktur desa, pelayanan kesehatan dan pendidikan. Hal ini menyebabkan BUMDes mendapatkan porsi anggaran yang relatif kecil. Sehingga, menghambat upaya untuk merekrut dan mempertahankan tenaga kerja yang terampil untuk menjalankan program-program yang direncanakan.

Penelitian ini menarik karena berfokus pada berbagai aspek, seperti efektivitas pengelolaan sumber daya, peran masyarakat dalam pengambilan keputusan dan dampak ekonomi yang dihasilkan bagi desa. Objek penelitian ini adalah pengelola BUMDes Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor. Rumusan masalah pada penelitian ini berfokus pada

implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pengelolaan BUMDes.

Penelitian ini menjadi menarik mengingat terdapat suatu penelitian terdahulu yang membahas tentang Implementasi Kebijakan Program Badan Usaha Milik Desa (Hardiansyah, 2023) perbedaannya adalah Kebijakan Perup Nomor 79 Tahun 2019 tentang pengelolaan BUMDes hasil dari adanya penelitian ini lebih spesifik pada implementasi dan dampak dari peraturan tersebut, serta bagaimana kebijakan ini dijalankan di tingkat desa.

## MATERI DAN METODE

Teori George C. Edward III dalam (Anggraini, 2019) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama diantaranya : komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Grindle dalam (Budi Winarno 2007:146) menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah bentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Ini artinya, kegiatan implementasi berkaitan dengan kebijakan yang diambil pemerintah harus memperjelas dan mempermudah pencapaian tujuan yang diterapkan. Jika tidak, berarti ada kesalahan dalam analisis kebijakannya (Irawan, 2019).

Kebijakan juga dapat diartikan sebagai serangkaian, tindakan, tujuan dan pernyataan resmi pemerintah terkait isu-isu tertentu. Langkah-langkah yang telah diambil, sedang diambil atau gagal diambil untuk diimplementasikan. Serta, penjelasan-penjelasan yang diberikan mengenai situasi yang ada. Istilah lain mengatakan bahwa kebijakan seringkali berkaitan dengan tujuan, program keputusan, undang-undang, ketentuan, usulan-usulan dan rencana besar (Wahab,2004).

Tujuan dibentuknya peraturan ini adalah untuk mewujudkan terbentuknya

BUMDes sesuai dengan potensi usaha desa, kondisi sosial, budaya dan dinamika masyarakat desa serta demokratisasi di desa. Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kuantitatif dengan analisis kuantitatif untuk mengukur implementasi BUMDes. Menurut (Sugiyono, 2017), metode kuantitatif fokus pada hasil yang diperoleh dari pengumpulan dan analisis data numerik. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan teknik *Weight Mean Score* (WMS) dan Skala Likert.

Populasi dalam konteks penelitian ini merujuk pada pengurus BUMDes dari empat Desa mewakili Kecamatan Cigombong diantaranya meliputi Desa Cigombong, Desa Wates Jaya, Desa Ciburuy dan Desa Srogol. Pada penelitian ini seluruh anggota populasi dijadikan sampel karena ukuran populasi yang terjangkau. Teknik yang digunakan yaitu Sensus Sampling (sampel jenuh), dimana semua anggota populasi dipilih sebagai sampel (Sugiyono, 2010). Sampel dari penelitian ini adalah Pengelola BUMDes dari 4 (empat) Desa sebanyak 41 orang. Terdiri dari Mantra (Mandiri Sejahtera) cigombong 10 sampel, Jaya Laksana Wates Jaya 14 sampel, Bagus Ciburuy 10 sampel, dan Baraya Asik Srogol 7 sampel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan BUMDes merupakan salah satu faktor kunci pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama di Kecamatan Cigombong. Hal ini memungkinkan mereka untuk meningkatkan pendapatan melalui pelaksanaan kegiatan ekonomi yang dapat memberdayakan mereka secara ekonomi. Oleh karena itu, untuk memperbaiki perekonomian masyarakat diperlukan kegiatan ekonomi yang mampu mendorong dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan adanya

program BUMDes yang dikelola langsung oleh penduduk desa.

### 1. Komunikasi

Dimensi Komunikasi diukur berdasarkan beberapa indikator diantaranya yaitu, Kejelasan Informasi, Konsistensi dan Sumber Informasi. Terdapat Adapun indikator-indikator yang mengukur keberhasilan variabel komunikasi sebagai berikut:

- Kejelasan Informasi
- Konsistensi
- Sumber Informasi

Tabel 1 Rekapitulasi Tanggapan Responden dari Dimensi Komunikasi.

No	Item Pernyataan	Mean	Kriteria Penilaian
1	Kejelasan informasi dalam sosialisasi yang dilaksanakan setiap desa tentang pengelolaan BUMDes.	4.07	Baik
2	Informasi mengenai pengelolaan BUMDes disampaikan secara konsisten.	3.73	Baik
3	Informasi yang disampaikan mempunyai manfaat kepada pengelola dan pelaku usaha.	4.49	Sangat Baik
<b>Jumlah</b>		<b>4.09</b>	<b>Baik</b>

Sumber: Hasil Penelitian 2024

Rekapitulasi dimensi komunikasi menunjukkan hasil baik dengan rataan nilai 4.09 mencakup sosialisasi mengenai Pengelolaan BUMDes, kejelasan informasi mengenai sosialisasi pengelolaan BUMDes, kejelasan Informasi yang disampaikan mempunyai manfaat kepada pengelola dan pelaku usaha.

## 2. Sumber Daya

Mengukur Dimensi Sumber Daya berdasarkan beberapa indikator diantaranya yaitu, kapasitas sumber daya, termasuk dana dan sarana serta prasarana, sangat krusial untuk kelancaran operasional BUMDes. Tanpa ketersediaan sumber daya yang memadai, BUMDes tidak akan dapat berfungsi dengan optimal. Adapun pengukuran keberhasilan variabel komunikasi dilakukan sebagai berikut:

- Kapasitas Sumber Daya Manusia
- Sumber Daya Dana
- Sarana dan Prasarana

Tabel 2 Rekapitulasi Tanggapan Responden dari Dimensi Sumber Daya.

No	Item Pernyataan	Mean	Kriteria Penilaian
1	Jumlah pengelola BUMDes yang memadai.	3.41	Baik
2	Dana yang diberikan sesuai dengan kebutuhan program usaha.	3.71	Baik
3	Tersedianya fasilitas infrastruktur yang dibutuhkan.	3.83	Baik
<b>Jumlah</b>		<b>3.65</b>	<b>Baik</b>

*Sumber: Hasil Penelitian 2024*

Rekapitulasi dimensi Sumber Daya menunjukkan suatu hasil yang positif, dilihat perolehan rataan nilai mencapai 3.65, yang termasuk dalam kategori "Baik". Penilaian ini mencakup kapasitas sumber daya manusia pengelola BUMDes, sumber dana yang diperoleh, serta ketersediaan sarana dan prasarana.

## 3. Disposisi

Sikap para pelaksana kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan publik. Surat pelaksana kebijakan memahami tugas mereka mengetahui langkah-langkah yang harus diambil dan memiliki kemampuan yang memadai maka, kebijakan tersebut akan efektif dan dapat menghindari praktik menyimpang.

Tabel 3 Rekapitulasi Tanggapan Responden dari Dimensi Disposisi.

No	Item Pernyataan	Mean	Kriteria Penilaian
1	Sikap responsif yang para pengelola BUMDes.	3.93	Baik
2	Ketersediaan pengelola dalam menerima dan melaksanakan kebijakan.	4.12	Baik
3	Pengelola BUMDes mempun yai rasa realitas motivasi yang baik.	4.05	Baik
4	Arahan/instruksi yang jelas dalam melaksanakan kebijakan	4.24	Sangat Baik
<b>Jumlah</b>		<b>4.08</b>	<b>Baik</b>

*Sumber: Hasil Penelitian, 2024*

Secara keseluruhan, yaitu rekapitulasi dimensi disposisi menunjukkan sebuah hasil yang memuaskan dengan rataan nilai tiap item dalam dimensi di atas mencapai 4.08 yang meliputi sikap para pelaksana yang responsif, ketersediaan pengelola dalam menerima dan melaksanakan kebijakan, intensitas tanggapan para pelaksana kebijakan dan arah/instruksi para pelaksana dalam mengelola BUMDes.

## 4. Struktur Birokrasi

Kebijakan tidak akan berjalan dan terrealisasi jika struktur birokrasi tidak tersedia, Meskipun sumber daya untuk

surat kebijakan tersedia dan pelaksana kebijakan memahami apa yang harus dilakukan serta memiliki motivasi untuk melaksanakannya, kekurangan dalam struktur birokrasi masih dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Indikator untuk struktur birokrasi meliputi *Standar Operasional Prosedur* (SOP), Tanggung Jawab para pelaksana kebijakan dan Pola Hubungan dalam Organisasi.

Tabel 4 Rekapitulasi Tanggapan Responden dari Dimensi Struktur Birokrasi.

No	Item Pernyataan	Mean	Kriteria Penilaian
1	Pengelola telah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan SOP (Standard Operating Procedure) yang ada dan melaksanakan koordinasi antar anggota	4.15	Baik
2	Pengelola BUMDes melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik terhadap melaksanakan kebijakan.	4.07	Baik
3	Pengelola BUMDes dan anggota kompak dalam merealisasikan keberhasilan BUMDes dan Program usaha yang dijalankan.	3.95	Sangat Baik
<b>Jumlah</b>		<b>4.05</b>	<b>Baik</b>

Sumber: Hasil Penelitian 2024

Secara keseluruhan, yaitu rekapitulasi dimensi struktur birokrasi dapat menunjukkan hasil diatas dapat dilihat dari nilai rataan dalam dimensi tersebut

mencapai 4.05 yang meliputi prosedur kerja/SOP para pengurus kebijakan, tanggung jawab para pelaksana kebijakan dan kekompakan dalam merealisasikan keberhasilan BUMDes dan program usaha yang dijalankan sikap para pelaksana yang responsif, ketersediaan pengelola dalam menerima dan melaksanakan kebijakan, pengelola BUMDes mempunyai rasa realitas motivasi yang baik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka, penulis dapat merangkum seluruh data pada tabel dimensi yang telah dituliskan di atas yaitu sebagai berikut:

Tabel 5 Rekapitulasi Variabel implementasi Kebijakan Perbup Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan BUMDes Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor.

Dimensi	Me.a n	Kriteria
<b>Komunikasi:</b>		
<b>Kejelasan Informasi</b>	4.07	Baik
<b>Konsistensi</b>	3.73	Baik
<b>Interpretasi</b>	4.49	Sangat Baik
<b>Total</b>	<b>4.09</b>	<b>Baik</b>
<b>Sumber Daya:</b>		
<b>Sumber Daya Manusia</b>	3.41	Baik
<b>Sumber Daya Dana</b>	3.71	Baik
<b>Sarana dan Prasarana</b>	3.83	Baik
<b>Total</b>	<b>3.63</b>	<b>Baik</b>
<b>Disposisi:</b>		
<b>Sikap para pelaksana</b>	3.93	Baik
<b>Kesediaan menerima dan melaksanakan kebijakan</b>	4.12	Baik
<b>Intensitas tanggapan</b>	4.05	Baik
<b>Arah/Instruksi pelaksana</b>	4.24	Sangat Baik
<b>Total</b>	<b>4.08</b>	<b>Baik</b>
<b>Struktur Birokrasi:</b>		
<b>SOP</b>	4.15	Baik
<b>Tanggung jawab atas kebijakan tersebut</b>	4.07	Baik
<b>Pola Hubungan Organisasi</b>	3.95	Baik
<b>SOP</b>	4.15	Baik
<b>Total</b>	<b>4.05</b>	<b>Baik</b>
<b>Total Rata-rata</b>	<b>3.68</b>	<b>Baik</b>

Sumber: hasil Penelitian 2024

Tabel diatas menyajikan hasil rekapitulasi dari keempat dimensi dimana, masing-masing telah dibagi kedalam beberapa indikator berdasarkan item pertanyaan yang menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan telah dilaksanakan dengan kategori "Baik" dan hasil skor akhir rataan nilai 3.68, dalam artian pengelola BUMDes sudah menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan benar. Selain itu, dengan adanya Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan BUMDes sangat membantu pengelola dalam menjalankan kebijakan dan program usaha-usaha sehingga, kebijakan dan program usaha yang dijalankan berjalan dengan baik.

Kemudian, skor nilai tertinggi dari keempat dimensi tersebut yaitu Komunikasi dengan nilai rataan sebesar 4.09 dengan nilai kriteria "Baik" dengan indikator kejelasan informasi, konsistensi, dan interpretasi diketahui bahwa dalam implementasi kebijakan harus terus menjalin komunikasi dengan rutin kepada pengelola maupun dengan pelaku usaha.

Dapat disimpulkan dalam sebuah penelitian ini, Komunikasi yang dilakukan oleh pengurus BUMDes termasuk kedalam kategori baik, dengan melaksanakan komunikasi antar desa dan kecamatan melalui rapat langsung maupun rapat online yang memastikan bahwa informasi disampaikan tepat waktu sesuai dengan perencanaan, serta menjaga kelancaran penyampaian informasi. Skor tertinggi kedua dari dimensi Disposisi mendapatkan rataan nilai terbesar 4.08 dengan kriteria nilai "Baik" dalam dimensi ini terdapat empat indikator yang masing masing memiliki satu item pernyataan yang menunjukkan bahwa berdasarkan hasil observasi dan wawancara bahwa mengenai sikap responsif, persediaan dalam melaksanakan kebijakan, realitas motivasi dan arahan instruksi yang baik menurut hasil observasi dan wawancara oleh pihak pengelola tiap desa. Dapat dianalisis bahwa pelaku kebijakan sudah menjalankan tugasnya secara responsif, kesedian dalam

melaksanakan kebijakan, menjalankan kebijakan sesuai prosedur kerja dan arahan instruksi sudah baik.

Skor tertinggi kedua dari dimensi Struktur Birokrasi mendapatkan rataan nilai terbesar 4.05 dengan nilai kriteria "Baik" dalam dimensi ini terdapat tiga indikator yang masing masing memiliki satu item pernyataan yang menunjukkan bahwa berdasarkan hasil observasi dan wawancara bahwa setiap pengurus atau pengelola BUMDes melakukan tugasnya secara terstruktur dan sesuai dengan arahan prosedur kerja. skor terendah yaitu terdapat pada dimensi sumber daya yang mendapatkan nilai rata-rata sebesar 3.63 yang masuk dalam kategori "Baik" dalam dimensi ini terdapat tiga indikator yang masing masing memiliki satu item pernyataan yang menunjukkan bahwa berdasarkan hasil observasi dan wawancara mengenai jumlah kapasitas sumber daya yang belum memadai dalam pelaksanaan kebijakan sehingga BUMDes berjalan tetapi tidak optimal, sumber pendanaan pun masih terdapat beberapa desa yang seringkali tidak cukup untuk mendukung berbagai kebutuhan operasional dan pengembangan usaha sehingga, terjadi adanya keterbatasan dalam pengembangan usaha dan memperluas kapasitas produksi, yang pada akhirnya membatasi potensi pertumbuhan dan kontribusinya terhadap ekonomi desa.

### **Hambatan apa saja yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes di Kecamatan Cigombong?**

Pada Implementasi Kebijakan tersebut terdapat suatu hambatan yaitu:

- a. Faktor komunikasi, kurangnya konsistensi dalam memberikan sosialisasi atau pelatihan kepada pengelola maupun pelaku usaha terkait bagaimana mengelola BUMDes dan menjalankan program BUMDes yang akan dijalankan atau sedang dijalankan dengan kurangnya sosialisasi dan

pelatihan membuat BUMDes berjalan tidak optimal.

Faktor Sumber daya, jumlah pengelola BUMDes atur sumber daya manusia yang kurang memadai dan karena keterbatasan dana membuat usaha tidak berkembang dan kesulitan untuk memperluas kapasitas produksi sehingga, tidak cukup mendukung berbagai kebutuhan operasional dan pengembangan usaha yang pada akhirnya membatasi potensi pertumbuhan dan kontribusinya terhadap ekonomi desa. Tetapi kurangnya sarana dan prasarana yang memadai juga menghambat proses pasca panen, penyimpanan, dan distribusi hasil pertanian dan peternakan, sehingga potensi ekonomi desa tidak dapat dioptimalkan.

### **Upaya apa saja yang dilakukan demi tercapainya kebijakan tersebut?**

Pada Implementasi kebijakan ada beberapa upaya yang dilakukan diantaranya yaitu:

1. Menyelenggarakan kegiatan rutin pelatihan, sosialisasi dan informasi yang internsip mengenai manfaat dan peluang yang ditawarkan oleh BUMDes ini bisa dilakukan melalui berbagai media seperti media cetak lokal atau dengan pertemuan warga, pengelola dan pelaku usaha agar mendapatkan wawasan mengenai cara mengelola, mengembangkan usaha, dan menggerakkan usaha desa dengan ide-ide inovatif.
2. Memaksimalkan anggaran dana yang ada untuk menjalankan program usaha dengan menganjurkan permohonan dana tambahan kur pemerintah kabupaten atau provinsi. Selain itu, mencari dana dari sumber lain seperti dana desa, bantuan pemerintah pusat. Kerjasama dengan pihak swasta dapat membantu dalam menyediakan dana tambahan serta membawa keahlian dan pengalaman baru dalam mengelola usaha, juga optimalisasi pendapatan

BUMDes yang sudah ada melalui strategi pemasaran yang lebih baik, diversifikasi produk/usaha dan peningkatan efisiensi operasional.

### **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

Hasil dari analisis data Implementasi Kebijakan Perbup Tentang Pengelolaan BUMDes di Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor sudah dilaksanakan dengan kategori "Baik" mendapatkan skor akhir rataan sebesar 3.68, dalam artian pengelola BUMDes sudah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan benar sesuai prosedur, serta dengan adanya kebijakan program Implementasi Peraturan Bupati Bogor Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan BUMDes sangat membantu dalam meningkatkan kinerja dan efektivitas pengelolaan BUMDes, sehingga BUMDes dapat berfungsi sebagai penggerak perekonomian desa dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.

Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan BUMDes berjalan dengan efektif. Hal ini diukur dengan mempertimbangkan empat dimensi, berdasarkan nilai indikator terbesar dan terkecil:

- a. penilaian tertinggi terdapat pada dimensi komunikasi dengan perolehan nilai rata-rata sebesar 4.09 dengan kategori "Baik". Hal ini menunjukkan bahwa BUMDes mampu menjalin komunikasi yang efektif antara pengelola, pemerintah desa dan masyarakat sebagai pelaku usaha. Keberhasilan ini juga mencerminkan bahwa informasi dan arahan terkait kebijakan pengelolaan BUMDes tersampaikan dengan jelas dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat.
- b. nilai terendah dalam implementasi kebijakan yaitu sumber daya dengan mendapatkan skor nilai rata-rata 3.63

dengan kriteria nilai "Baik". Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tentang pengelolaan BUMDes sudah baik akan tetapi terdapat kekurangan dalam hal sumber daya manusia yang kompeten dan memadai serta sarana prasarana yang belum sepenuhnya tercukupi untuk mendukung operasional BUMDes secara optimal.

Kemudian adanya Perbup Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pengelolaan BUMDes memberikan kerangka hukum yang jelas untuk pengelolaan dan pengembangan BUMDes. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya, memberdayakan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Implementasi yang baik dari peraturan ini dapat membawa dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan BUMDes.

## **IMPLIKASI**

Dalam penelitian ini ditentukan tingkat keberhasilan implementasi kebijakan dengan menerapkan teori implementasi kebijakan BUMDes di Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor dengan menggunakan perspektif George C. Edward III (2019) yaitu:

1. Tingkat komunikasi, fokusnya adalah mendorong penyebarluasan komunikasi, penerimaan oleh manajemen dan pemangku kepentingan bisnis, dan secara konsisten memberikan informasi terkini terkait program.
2. Tingkat sumber daya, berfokuskan pada pengembangan sumber daya manusia, pendanaan, sarana dan prasarana.
3. Tingkat disposisi fokus pada penyempurnaan petunjuk/instruksi pengelolaan BUMDes.
4. Struktur birokrasi tingkat keempat yang menitikberatkan pada standar operasional prosedur (SOP) dan pelaksanaan tanggung jawab serta pola hubungan baik.

Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan khasanah keilmuan yang bermanfaat kontribusi sebagai bahan pertimbangan dan ide yang berguna terkait implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan BUMDes. Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi pengurus BUMDes dalam merancang kebijakan pengembangan program BUMDesdi Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas program-program usaha di setiap desa, yang merupakan bagian dari kemajuan dan perkembangan desa di Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, sesuai dengan pedoman yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi contoh positif bagi desa-desa lainnya dalam mencapai kemajuan dan perkembangan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agunggunanto Yusuf Edy. (2016). Pengembangan Desa Mandiri melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
- Alfarisi, S., Sujianto, S., & Heriyanto, M. (2017). Implementasi Peraturan Daerah Tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Jiana Jurnal Ilmu Administrasi Negara), 15(2), 279-287.
- Alkadafi, M. (2014). Pengaruh Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju ASEAN Economic Community 2015. Jurnal El-Riyasah, 32-40.
- Anggraini, S. A. (2019). Implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran (Studi Kasus Di Jl. Arif Rahman Hakim Kota Surabaya).
- Aprilia, D. (2023). Implementasi Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan

- Bantuan Sosial Dalam Pengelolaan Dana Hibah Koperasi (Studi: Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bogor) (Doctoral Dissertation, Universitas Djuanda Bogor).
- Apriliani, A., & Bawamenewi, V. A. (2024). Implementasi Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Karimah Tauhid, 3(2), 1303-1314.
- Dr, P. (2008). Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Cv. Alfabeta, Bandung, 25.
- Hardiansyah, Suminar (2023) Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.
- Hidayati. (2015). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sipakamase Pincara Kabupaten Pinrang. In Jurnal Ilmiah (Vol. 11).
- Ihsan, A. N., & Setiyono, B. (2018). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep. Journal Of Politic And Government Studies, 7(04), 221-230.
- Irawan, B. , & M. A. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 Bab Viii Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Terkait Dengan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Banyumas. Journal Of Public Policy And Management Review, 9(1), 30-50., 1-21.
- Islami, S. S., Purnamasari, I., & Serang. G. (2020). Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Bogor. Jurnal Governansi, 6(1).
- La Suhu, B., Djae, R. M., & Sosoda, A. (2020). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Geti Baru Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan. Jurnal Government of Archipelago-Jgoa, 1(1).
- Liow, H., Lengkong, F. D., & Palar, N. A. (2018). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tondegesan Kecamatan Kawangkoan. Jurnal Administrasi Publik, 4(61).
- Louhenapessy, A. M., Amri, C., & Pratidina, G. (2015). Implementasi Kebijakan Kepala Pasar Dalam Program K3 (Kebersihan, Keamanan Dan Ketertiban) Di Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor. Jurnal Governansi, 1(2), 79-88.
- Manongga, A., Pangemanan, S., & Kairupan, J. (2018). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kelurahan Pinokalan Kota Bitung. Jurnal Eksekutif, 1(1).
- Maryunani, M. (2008). Pembangunan Bumdes dan pemberdayaan pemerintah desa. CV Pustaka Setia.
- Peraturan Bupati Bogor Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- Ridwan, Z. (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa dalam Pembangunan Perekonomian Milik Desa. Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum, 8(3).
- Sa'dullah. (2016). Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Untuk Mewujudkan Desa Mandiri. Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(2), 104-107.
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, D. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Alfabeta
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). Jurnal Pendidikan Tambusai, 7 Nomor 1(2614-3097), 2896-2910.